RI Siapkan Aturan Main

Tanggal	: Sabtu , 19 Juni 2021
Media	: Bisnis Indonesia
Halaman	: 13
Wartawan	: Asteria DK Sari
Muatan Berita	: Netral
Narasumber	: Teguh Kurniawan Harmanda *(COO Tokocrypto)*, Jericho Biere *(Research and Development ICDX)*, Indrasari Wisnu Wardhana *(Kepala Bappebti)*
Rubrik	: Spotlight
Topik	: Kripto

| ASET KRIPTO |

RI SIAPKAN ATURAN MAIN

Perdagangan aset kripto di Indonesia terbilang cukup besar dan berkembang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Animo investor milenial menjadi kekuatan aset kripto di Tanah Air.

Asteria D.K. Sari
asteria.desi@bisnis.com

Peluang besar dalam mengembangkan ekosistem pasar aset kripto di Indonesia masih terbuka lebar. Apalagi, saat ini pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) tengah menggodok pembentukan bursa khusus aset kripto.

Meskipun dari sisi regulasi belum bisa mencakup seluruh aspek yang melibatkan aset kripto, regulasi yang digunakan saat ini diharapkan menjadi titik awal ekosistem yang lebih terarah serta pedoman bagi para pemain dalam industri kripto.

Dari kacamata pelaku usaha kripto, COO TokoCrypto Teguh Kurniawan Harmanda mengatakan di Indonesia sejauh ini, regulasi yang mengatur aset kripto hanya sebatas perdagangan atau dan menjadikan aset tersebut sebagai komoditas investasi.

"Sebenarnya Bappebti sudah cukup terbuka, kami sadar tidak ada aturan yang menyenangkan semua pihak. Aturan kripto terlihat sangat cepat karena mengunakan aturan eksisting [perdagangan komoditas berjangka]. Tapi [jika dilihat lagi, aturannya] memang tidak ideal," katanya dalam webinar Kamis (17/6).

Dia bercerita sebelumnya Bappebti telah menawarkan dua opsi untuk menggunakan dasar hukum yang telah ada yakni menggunakan aturan yang selama ini berlaku bagi perdagangan komoditas berjangka atau membentuk aturan baru yang khusus untuk melayani perdagangan aset kripto.

Apabila membentuk aturan baru, konsekuensi yang harus diterima oleh para pelaku usaha adalah proses yang tidak sebentar.

"Makanya kami memilih menggunakan aturan yang ada di dalam perdagangan komoditi," katanya.

Selain itu, untuk memperkuat ekosistem industri kripto di Indonesia, lanjutnya, pada akhir tahun 2020, telah dibentuk sebuah asosiasi khusus bernama Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) yang menaungi hampir seluruh pedagang aset kripto di Indonesia serta Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (ICDX) dan Indonesia Clearing House (ICH).

Adapun, lembaga nonprofit tersebut bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terkait aset kripto serta berperan sebagai jembatan untuk berdiskusi dengan regulator.

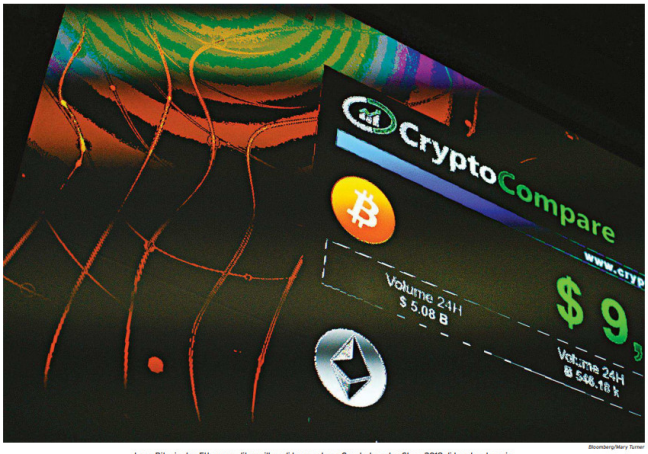
Sementara itu, dari sisi peluang, menurut Harmanda, pelaku industri aset kripto bisa memanfaatkan masih banyaknya masyarakat Indonesia yang *unbankable* dan belum tersentuh oleh fasilitas investasi yang ada selama ini.

"Bersifat tanpa perantara, aset kripto ini bisa dimanfaatkan oleh siapa saja yang memiliki akses internet dalam jaringan global," katanya.

Meskipun peluang bagi industri kripto di Indonesia masih besar, dia menilai bahwa industri aset kripto masih punya sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Menurutnya, banyak yang memandang aset kripto sebagai aset yang dari segi harga sangat fluktuatif dan memiliki risiko yang sangat tinggi.

"Industri kripto bukan dilihat dari sisi harga kriptonya saja, melainkan juga bisnisnya yang riil memiliki teknologi yang masif, sama seperti industri teknologi, jadi mengapa masih dikucilkan?" katanya.

Tantangan lainnya, masih banyak anggapan bahwa industri kripto sangat rentan dengan pencucian uang ataupun jenis penipuan lainnya. Karena itu, edukasi untuk masyarakat tentang aset kripto masih dibutuhkan.



Logo Bitcoin dan Ethereum ditampilkan di layar selama Crypto Investor Show 2018 di London, Inggris.

> **Sebenarnya Bappebti sudah cukup terbuka, kami sadar tidak ada aturan yang menyenangkan semua pihak.**

ATURAN PAJAK

Di sisi lain, saat ini pemerintah disebut-sebut tengah menggodok mengenakan pajak atas aset kripto. Terkait hal itu, Harmanda menilai penerapan pajak atau penambahan penghasilan kepada negara akan memberikan dampak baik terhadap industri.

"Karena industri [aset kripto] akan memiliki legitimasi dan hal tersebut dianggap industri ini sudah diakui secara sah. Jadi lebih lengkap," ucap Harmanda.

Kendati begitu, dia mengingatkan ada beberapa poin yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sebelum memutuskan menerapkan pajak untuk aset kripto.

Dia mengkhawatirkan penerapan pajak akan menghambat lanju pertumbuhan industri kripto itu sendiri. Untuk itu, lanjutnya, salah satu kunci yang perlu diperhatikan pemerintah adalah industri kripto adalah bisnis yang tidak memiliki batasan kaku.

"Ibaratnya anak ABG yang dibuat [aturan] kaku nanti bisa bahaya dan kita juga menginginkan penerapan pajak dapat membuat nasabah atau *trader* di Indonesia malah lari keluar [negeri]. Memperlambat itu bisa jadi menyebabkan nasabahnya pada kabur dan *operasional exchange* tergangu," ujarnya.

Sementara itu, Research & Development Manager ICDX Jericho Biere mengatakan untuk membentuk bursa aset kripto perlu adanya keseimbangan hubungan antara pedagang aset kripto, Bappebti, dan juga nasabah sehingga dapat mewujudkan ekosistem dan pengawasan yang sehat.

"Negara lainnya sama bingungnya [terkait aset kripto], model seperti apa yang akan dibangun apakah akan sama seperti saham. Jadi perlu ada suatu pandangan baru dari regilator supaya pemahaman lebih dalam untuk menemukan titik temu yang pas, dan keamanan yang lebih terproteksi," tambahnya.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan, otoritasnya bersama dengan instansi terkait seperti Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan masih terus membahas rencana pengenaan pajak penghasilan (PPh) untuk investasi aset kripto di Indonesia.

Indrasari memaparkan, saat ini pajak yang dikenakan pada aset kripto masih berupa PPh badan yang ditanggung oleh pedagang aset kripto. Ke depannya, pajak yang akan dikenakan untuk aset kripto adalah PPh final.

"Rencananya akan PPh final seperti yang berlaku pada bursa efek. Untuk besarannya juga masih kami kaji," jelasnya.

Dia berharap kehadiran pajak untuk aset kripto ini dapat menjadi insentif bagi para investor untuk masuk ke pasar kripto di Indonesia. Hal ini terutama bagi para investor-investor luar negeri. ◙


Petugas melayani pengunjung di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu, Jakarta.


Lokasi 'penambangan' mata uang kripto yakni Bitfarms di Saint-Hyacinthe, Quebec, Kanada.